

**KESANTUNAN DAN DAYA PRAGMATIK TINDAK TUTUR DIREKTIF
PASLON PEMILIHAN GUBERNUR DI WACANA POLITIK SKH NASIONAL
DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMP**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

Hermawan Adi Saputra

A310130195

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**KESANTUNAN DAN DAYA PRAGMATIK TINDAK TUTUR DIREKTIF
PASLON PEMILIHAN GUBERNUR DI WACANA POLITIK SKH NASIONAL
DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMP**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HERMAWAN ADI SAPUTRA

A310130195

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

NIP. 196504281993031001

HALAMAN PENGESAHAN

**KESANTUNAN DAN DAYA PRAGMATIK TINDAK TUTUR DIREKTIF
PASLON PEMILIHAN GUBERNUR DI WACANA POLITIK SKH NASIONAL
DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMP**

OLEH

HERMAWAN ADI SAPUTRA

A310130195

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 31 Mei 2017

dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M, M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

NIP. 196504281993031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 April 2017

Penulis



HERMAWAN ADI SAPUTRA

A310130195

**KESANTUNAN DAN DAYA PRAGMATIK TINDAK TUTUR DIREKTIF
PASLON PEMILIHAN GUBERNUR DI WACANA POLITIK SKH
NASIONAL DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA
INDONESIA DI SMP**

Abstrak

Penelitian ini meliputi tiga tujuan, (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif paslon gubernur di wacana politik SKH nasional, (2) mendeskripsikan daya pragmatik paslon gubernur di wacana politik SKH nasional, (3) mendeskripsikan implikasinya tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana politik SKH nasional terhadap bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP. Penelitian ini dilakukan pada tuturan para paslon gubernur DKI Jakarta di media cetak SKH Nasional (Kompas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta menggunakan strategi terpancang (*embedded research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitian ada tiga hal, (1) bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif dalam paslon gubernur di wacana politik meliputi: menargetkan, menyuruh, mengarahkan, menawarkan, mengusulkan, mengharapkan, memohon, menyarankan, menganjurkan, menuntut, menyerukan, meminta, mendukung, memberikan saran, mendorong, menantang, mengintruksikan, mengingatkan, mencegah, melarang, mengajak, mengkritik, dan menghimbau. (2) Daya pragmatik pada paslon gubernur di wacana politik mengandung enam daya meliputi: daya mencemooh, daya mengkritik, daya menyindir, daya mengancam, daya menuntut, daya mendesak, dan daya menyuruh. (3) implikasinya tindak tutur direktif terhadap bahan ajar bahasa Indonesia pada KD 1.2 menanggapi isi laporan kelas VIII semester 1.

Kata kunci: kesantunan, daya pragmatik, bahan ajar bahasa Indonesia.

Abstract

The aim of this research is including three things, (1) to describe the form of direct mannerliness act of paired governors' candidates in political discourse of national daily newspaper, (2) to describe the pragmatic effort of paired governors' in political discourse of national daily newspaper, (3) to describe the implication of direct mannerliness act in political discourse of national daily newspaper towards Indonesian language lesson planning in Junior High School. This research had been done on the speech of paired governors' candidates of DKI Jakarta on the daily National (Kompas). This research is using qualitative descriptive method, and using embedded research strategy. Technique in collecting the data is using gathering and note-taking technique. The results of the research consist of three results about direct mannerliness act and pragmatic effort that consist of 30 data. 1) The form of direct mannerliness act of paired governors' candidates, as follows: targeting, ordering, directing, offering, proposing, hoping, begging, suggesting, recommending, prosecuting, proclaiming, requesting, supporting, giving advice, encouraging, challenging, instructing, reminding, preventing, prohibiting, asking, criticizing, and

urging. 2) Pragmatic effort of paired governors' candidates on politic expression containing six efforts: jeering, criticizing, teasing, threatening, prosecuting, insisting, and ordering. 3) The implementation of direct mannerlines act towards Indonesian Language lesson planning on first semester of grade VIII within point 1.2 of Basic Competence about perceiving reports' contents.

Keywords: mannerliness, pragmatic effort, Indonesian language teaching material.

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia berbeda dengan binatang, yang membedakannya adalah bahasa yang dimiliki manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan. Lingkungan dan kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi bahasa seorang. Tanpa disadari dan dipahami, jarang sekali manusia memperhatikan bahasa yang digunakan di dalam kesehariannya sebagai alat komunikasi yang utama. Dengan bahasa diharapkan komunikasi antara pembicara dengan penyimak dapat berjalan dengan baik. Maka, bahasa memiliki peran penting dalam proses komunikasi.

Bahasa semakin hari akan berkembang dan tidak selalu sama. Dalam berkomunikasi yang diajarkan bukanlah bentuk bahasanya, tetapi penggunaan bentuk bahasa yang digunakan. Selain itu, bahasa digunakan untuk mencari informasi atau memberikan informasi kepada orang lain. Terkait dengan penggunaan bentuk bahasa tentu akan tergantung siapa yang menggunakan bahasa dan kesantunan berbahasanya. Hal ini mengingatkan kembali penggunaan bentuk bahasa tulis yang akan digunakan disetiap wacana akan berbeda. Seperti wacana politik sangatlah berbeda dengan wacana humor, puisi, dan sejenisnya. Maka penggunaan bentuk bahasa ketika penutur menggunakan bahasa dalam komunikasi akan terlihat kesantunan berbahasa pada konteks tertentu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mefoluskan penelitian pada kesantunan dan daya pragmatik tindak tutur direktif di wacana politik paslon pemilihan gubernur SKH Nasional. Selain itu, hasil penelitian ini diimplikasi sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP. Hal ini dipengaruhi oleh oleh peneliti sebagai tenaga pendidik dan peneliti berasumsi bahwa SMP dalam berkomunikasi

terdapat tuturan yang menyerang mitra tutur. Sehingga hasil tuturan menjadi santun dan memiliki efek tertentu.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif paslon gubernur di wacana politik, daya pragmatik paslon gubernur di wacana politik, dan Implikasinya tindak tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana politik SKH nasional terhadap bahan ajar bahasa indonesia di SMP.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian pertama yang relevan ini dilakukan oleh Yuliana dkk (2013:1-14) yang berjudul “Daya Pragmatik Tindak Tutur Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama”. Tujuan penelitian ini adalah membahas jenis-jenis tindak tutur yang digunakan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas dan daya pragmatik yang terkandung dalam tindak tutur guru bahasa Indonesia di kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur yang digunakan guru bahasa Indonesia dalam proses kegiatan pembelajaran menggunakan tindak tutur ilokusi yang terdiri dari: tindak representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Daya pragmatik dalam penelitian ini melalui tindak tutur direktif yang terdiri dari: daya memberi informasi, daya mempengaruhi, daya menyuruh, daya menegur, daya mengkritik, daya menyarankan, daya memuji, daya memutuskan, daya menyindir, dan daya memarahi. Persamaan penelitian yang dilakukan Yuliana dkk dengan peneliti yang dilakukan terletak pada tindak tutur direktif dan daya pragmatik. Perbedaannya peneliti memfokuskan pada penggunaan tindak tutur direktif dan daya pragmatik paslon pemilihan gubernur di wacana politik.

Selain Yuliana dkk, penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Trosbrog (1995) yang berjudul *Statutes and contracts: An analysis of legal speech acts in the English language of the law*. Penelitian ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam tindak tutur hukum dalam teks-teks legislatif dan kontrak di bidang bahasa Inggris Hukum Kontrak. Objek utama penelitian adalah fungsi regulatif dengan pandangan tertentu untuk membangun pola realisasi fungsi retorik direktif dan tindakan komisif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa bahasa hukum khas memilih pola regulatives berbeda dari, misalnya, pola biasanya dipilih dalam bahasa Inggris percakapan sehari-hari. Karakteristik bahasa hukum dapat diartikan dalam kepatuhan terhadap lembaga-lembaga hukum, serta dalam hal ganti rugi wajah diperlukan oleh situasi sosial-pragmatis. Persamaan penelitian yang dilakukan Trosbrog dengan peneliti yang dilakukan terletak pada kajian tindak tutur. Perbedaannya peneliti memfokuskan pada penggunaan tindak tutur direktif dan daya pragmatik paslon pemilihan gubernur di wacana politik. Serta di implikasikan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP.

Peneliti menggunakan empat landasan teori dalam mengkaji masalah ini. Landasan teori tersebut berhubungan dengan (1) tindak tutur, (2) kesantunan, (3) daya pragmatik, dan (4) bahan ajar.

Landasan teori *pertama* berhubungan dengan tindak tutur dari Austin, Searle dalam Chaer (2010: 29) membagi tindak tutur atas lima kategori. Representatif, direktif, ekspresif, komisif dan deklarasi. Yule (2006: 9) Direktif merupakan jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi; perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran, dan bentuknya dapat berupa kalimat positif maupun negatif. Penelitian ini menggunakan tindak tutur direktif yaitu tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan. Objek tindak tutur direktif pada Paslon pemilihan gubenur DKI Jakarta dalam wacana politik SKH nasional (kompas). Tutaran tertulis pada media cetak adalah janji-janji oleh pasangan calon gubenur.

Landasan teori *kedua* berhubungan dengan kesantunan dari Brown dan Levinson (Chaer, 2010:49-55) mengatakan bahwa teori kesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka (*face*). Muka itu dibagi menjadi dua segi yaitu muka negatif dan muka positif. Muka negative itu mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional yang berkeinginan agar dihargai dengan jalan yang membiarkannya bebas melakukan tindakan. Bila tindak tuturnya bersifat direktif misalnya perintah atau permintaan maka yang terancam muka negatif. Sedangkan muka positif yakni mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional, yang berkeinginan agar yang dilakukannya, apa yang dimilikinya atau apa yang dilakukan atau dimilikinya, diakui

orang lain sebagai suatu hal yang baik, yang menyenangkan, yang patut dihargai, dan seterusnya. Karena ada dua sisi muka yang terancam yaitu muka negatif dan muka positif maka kesantunan pun dibagi menjadi dua, yaitu kesantunan negatif (kesantunan deferensial) untuk menjaga muka negatif dan kesantunan positif (kesantunan afirmatif) untuk menjaga muka positif. Dengan adanya kesantunan negatif dan positif akan sangat berpengaruh dalam kesantunan berbahasa. Kesantunan tersebut maka, pada paslon gubernur DKI Jakarta pada wacana politik akan terlihat dalam setiap penggunaan bentuk bahasa.

Landasan teori *ketiga* berhubungan dengan daya pragmatik yang berkaitan dengan tuturan maka tuturan itu memiliki efek atau daya pragmatik yakni tuturan yang mempunyai makna tersirat di dalamnya, yang mampu merangsang kepekaan seorang mitra tutur untuk melakukan apa yang dimaksudkan oleh penutur (Yuliana dkk, 2013:5). Menurut Leech (1993:23) ada dua daya yakni daya ilokusi dan daya retorik kedua daya ini secara tidak langsung bersama-sama membentuk sebuah daya, yaitu daya pragmatik. Lebih dalam lagi, Leech (1993:45) menjelaskan daya juga dapat diperkirakan melalui dengan implikatur.

Landasan teori *keempat* berhubungan dengan bahan ajar. Departemen Pendidikan Nasional bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau *teaching-material*, terdiri atas dua kata yaitu *teaching* atau mengajar dan *material* atau bahan. Menurut Chomsin S. Widodo dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis kesantunan dan daya pragmatik tindak tutur direktif paslon pemilihan gubernur di wacana politik SKH nasional dan implikasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan strategi terpancang

(*embedded research*). Dalam hal ini, peneliti sudah menentukan variable penelitian sejak awal. Variable yang dimaksud adalah bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif, daya pragmatik paslon pemilihan gubernur di wacana politik, dan implikasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan penelitian *kesantunan dan daya pragmatik tindak tutur direktif Paslon pemilihan gubernur di wacana politik skh nasional dan implikasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP*. Penulis mengkhususkan pada Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta yang terdapat dalam media cetak *kompas*. Dalam analisis penelitian ini meliputi tiga hal, yakni: a) bentuk-bentuk tindak kesantunan tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana politik SKH nasional, b) maksud daya pragmatik paslon gubernur di wacana politik SKH nasional, c) implikasinya tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana politik SKH nasional terhadap bahan ajar bahasa Indonesia di SMP. Strategi kesantunan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Brown dan Levinson (1978).

3.1 Bentuk-bentuk Tindak Kesantunan Tindak Tutur Direktif Paslon Gubernur di Wacana Politik SKH Nasional

Berdasarkan 30 data yang dianalisis terdapat bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif dalam paslon gubernur yang mengandung beberapa tindak tutur direktif. Peneliti mengkategorikan kesantunan direktif yang meliputi tipe memerintah, tipe meminta, tipe mengajak, tipe memberikan nasihat, tipe mengkritik dan tipe melarang. Selain itu, ada beberapa kesantunan positif dan kesantunan negatif dalam tuturan paslon (pasangan calon) gubernur DKI Jakarta saat berkampanye berlangsung. Berikut data dan analisisnya:

3.1.1 Kategori Tipe Memerintah

Tindak Kesantunan Direktif Menyuruh

Data (02)

Pasangan Agus-Sylvi dating ke acara penetapan pasangan calon itu dengan batik bermotif. Monumen Nasional (Monas) dan ondel-ondel.

Agus ingin memopulerkan batik khas Betawi. Menurut Agus, banyak perajin DKI yang perlu difasilitasi untuk meningkatkan angkat produksi.

(D.02/Kompas: “Dana Mesti Dilaporkan,” 25 Oktober 2016).

Eksplikatur : Menurut Agus, banyak perajin DKI yang
perlu difasilitasi untuk meningkatkan angkat produksi.

Permarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual:-Pn adalah calon pasangan gubernur DKI Jakarta.

- Saat menghadiri rapat pleno terbuka di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Implikatur : - Pn ingin mepopulerkan batik khas Betawi

- Salain itu Pn juga ingin pada Mt meningkatkan angka produksinya agar ada dana masuk.

TTD : Menyuruh

Berdasarkan data di atas, terlihat Pn, menggunakan tuturan yang mengandung kesantunan positif. Karena Pn dalam tuturannya *Menurut Agus, banyak perajin DKI yang perlu difasilitasi untuk meningkatkan angkat produksi.* Termasuk strategi kesantunan positif pada memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan lawan tutur.

3.1.2 Kategori Tipe Meminta

Tindak Kesantunan Direktif Menawarkan

Data (04)

Anies menjanjikan kemungkinan mewujudkan kredit rumah susun bagi warga tak mampu. Berbeda dengan konsep Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, rumah susun itu pada akhirnya dapat dimiliki penghuni dengan angsuran ringan.

(D.04/Kompas: “Wujudkan Jakarta yang Lebih Beradab,” 28 Oktober 2016).

Eksplikatur : *Anies menjanjikan kemungkinan mewujudkan kredit rumah susun bagi warga tak mampu.*

Pemarkah Lingual : -

Penada Nonlingual : - Pn adalah calon gubernur DKI Jakarta.

- Pn pada saat mengunjungi warga keturunan Thionghoa Glodog, Jakarta Barat.

Implikatur : - Pn inginkan Mt sejahtera dengan kredit rumah susun bagi warga tak mampu.

- Selain itu Pn juga melihat data ekonomi Mt dampaknya agar meringankan beban rumah susun yang di tempati nantinya.

TTD : Menawarkan

Berdasarkan data di atas, terlihat Pn menggunakan tuturan yang mengandung strategi kesantunan positif. Karena Pn dalam tuturan *Anies menjanjikan kemungkinan mewujudkan kredit rumah susun bagi warga tak mampu*. tuturan tersebut terasuk golongan strategi kesantunan positif pada memberikan tawaran atau janji kepada Mt.

3.1.3 Kategori Tipe Mengajak

Tindak Kesantunan Direktif Menargetkan

Data (01)

Pasangan Anies-Sandi datang berseragam kemeja putih. Mereka didampingi tim pendukung berpakaian senada, perwakilan partai politik, dan Ketua Tim Pemenangan Mardani Ali Sera. Anies optimistis mengalahkan pasangan petahana. Slogan “Maju Bersama” menjadi konsep dasar program kerja
(D.01/Kompas: “Dana Mesti Dilaporkan,” 25 Oktober 2016).

Eksplikatur : *Anies optimistis mengalahkan pasangan petahana.*

Permarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual: - Pn adalah calon pasangan gubernur DKI Jakarta.

- Saat menghadiri rapat pleno terbuka di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Implikatur : - Pn ingin memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

- Pn selain ingin memenangkan Pilkada, juga ingin mengalahkan pasangan petahana.

TTD : Menargetkan

Berdasarkan data di atas, terlihat Pn, dalam hal ini paslon urutan 3 menggunakan tuturan yang mengandung kesantunan positif. Karena Pn dalam tuturannya *Anies optimistis mengalahkan pasangan petahana*, termasuk strategi kesantunan positif pada memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan lawan tutur.

3.1.4 Kategori Tipe Memberi Nasihat

Tindak Kesantunan Direktif Menyarankan

Data (08)

Calon gubernururut 3, Anies Baswedan mendatangi kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kemarin. Ia menjanjikan soal program dokter kelilingi dan Kartu Jakarta Pintar. Guna menerobos kemacetan, Anies kerap berkelilingi menggunakan ojek.

(D.08/Kompas: “KPU Umumkan Daftar Pemilih,” 7 November 2016).

Eksplikatur : *Ia menjanjikan soal program dokter kelilingi dan kartu Jakarta pintar.*

Pemarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : - Pn adalah calon pasangan gubernur DKI Jakarta.
- Pn pada saat mendatangi kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Implikatur : - Pn berharap masyarakat tidak khawatir soal program dokter kelilingi dan kartu Jakarta pintar.
- Pn ingin Mt kehidupannya terpenuhi dengan program tersebut.

TTD : Menyarankan

Berdasarkan data di atas, terlihat Pn menggunakan tuturan yang mengandung strategi kesantunan positif pada Mt. Karena dalam tuturannya *Ia menjanjikan soal program dokter kelilingi dan kartu Jakarta pintar*. Dengan tuturan itu termasuk strategi kesantunan positif pada memberikan hadiah kepada Mt jika terpilih nantinya.

3.1.5 Kategori Tipe Mengkritik

Tindak Kesantunan Direktif Mengkritik

Data (25)

Masih Lemah

Ditemui secara terpisah, tim pasangan calon Basuki dan Djarot Saiful Hidayat menilai penanganan kasus penghadangan kampanye oleh pengawas pemilu dan penegak hukum masih lemah. Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi.

(D.25/Kompas: “Polisi Tegaskan Penghadangan Pidana,” 17 November 2016)

Eksplikatur : *Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi.*

Pemarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : - Pn adalah paslon gubernur DKI Jakarta Basuki-Djarot.
- Pn melaporkan penghadangan kampanye oleh Bawaslu Dan panwaslu.

Implikatur : - Pn merasa geram tindakan Mt yang selalu tidak tuntas masalahnya.
- Pn merasa kasus lama tidak segera tuntas dan kasus baru datang.
- Mt akan melakukan tindakan penghadangan kampanye.

TTD : Mengkritik

Berdasarkan data di atas, terlihat Pn menggunakan tuturan yang mengandung strategi kesantunan negatif. Karena Pn dalam tuturannya menyatakan *Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi*. Dengan tuturan tersebut, termasuk strategi kesantunan negatif pada pakailah bentuk impersonal yaitu dengan tidak menyebutkan penutur dan lawan tutur. Pn menilai Mt penanganan kasusnya

tidak segera tuntas. Pn ingin Mt melakukan suatu tindakan agar kasusnya bisa tuntas dan tidak menunggu terlalu lama.

3.1.6 Kategori Tipe Melarang

Tindak Kesantunan Direktif Mencegah

Data (20)

Cagub nomor urut 3, Anies Baswedan juga mempercayakan pengawasan Pilkada DKI kepada warga Jakarta. Anies optimistis warga Jakarta kritis terhadap kecurangan pada Pilkada ini. “Yang mau coba-coba curang harus hati-hati karena warga Jakarta tak akan membiarkan itu terjadi,” katanya, sabtu.

(D.20/Kompas: “Warga Diharapkan Aktif Mencegah Kecurangan,” 23 Januari 2017).

Eksplikatur : *“Yang mau coba-coba curang harus hati-hati karena warga Jakarta tak akan membiarkan itu terjadi,” katanya, sabtu.*

Pemarkah Lingual : Tanda Petik dua (“..”)

Penanda Nonlingual : - Pn adalah paslon gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan.
- Pn saat dimintai keterangan tentang masalah kecurangan pada Pilkada.

Implikatur : - Pn sangat keberatan jika ada yang mau coba-coba curang Pilkada maka Mt akan melakukan sesuatu.Mencegah

TTD : - Mencegah

Berdasarkan data di atas, terlihat Pn menggunakan tuturan yang mengandung strategi kesantunan positif. Karena Pn dalam tuturannya menyatakan *“Yang mau coba-coba curang harus hati-hati karena warga Jakarta tak akan membiarkan itu terjadi,” katanya, sabtu.* Dengan tuturan tersebut, termasuk strategi kesantunan

positif pada menunjukkan keoptimisan kepada Mt untuk melakukan suatu tindakan pencegahan saat Pilkada berlangsung.

3.2 Daya Pragmatik Paslon Gubernur di Wacana Politik SKH Nasional

Maksud tuturan Paslon Gubernur dalam berekspresi mengandung beberapa maksud daya pragmatik. Peneliti menemukan beberapa maksud daya pragmatik dari tuturan Paslon Gubernur. Daya mencemooh, daya mengkritik, daya menyindir, daya mengancam, daya menuntut, daya mendesak, dan daya menyuruh. Sebagai berikut ini data dan analisisnya:

3.2.1 Daya Mencemooh

Daya mencemooh adalah kekuatan pesan yang ditimbulkan untuk menghasilkan suatu tuturan yang diujarkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan ingin menjelekkkan mitra tutur.

Data (23)

Mereka bernyanyi meminta Djarot segera keluar dari kawasan itu. Marwan (46), koodinator aksi, menegaskan, aksi itu terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama, pasangan Dajarot. “Kami tak ada urusan dengan pilgub. Urusan kami soal penistan agama yang dilakukan Ahok,” ucapnya.

(D.23/Kompas: “Cegah Hak Pilih Hilang,” 10 November 2016).

Eksplikatur : *“Kami tak ada urusan dengan pilgub. Urusan kami soal penistaan agama yang dilakukan Ahok,” ucapnya.*

Pemarkah Lingual : Tanda Petik Dua (“ “)

Penanda Nonlingual : - Pn adalah salah satu warga DKI Jakarta.
- Pn saat didatangi oleh paslon nomer urut 2 di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat.
- Pn menolak paslon nomer urut 2 Djarot untuk

melakukan kampanye.

- Implikatur : - Pn melarang Mt untuk berkampanye di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat.
- Pn tidak pantas untuk mencalonkan gubernur DKI Jakarta karena dia melakukan penistaan agama.

Berdasarkan data di atas terlihat Pn dalam menggunakan daya mencemooh menyampaikan tuturannya kepada Mt yakni paslon gubernur DKI Jakarta oleh Basuki-Djarod saat berkampanye di daerah Kembangan Utara, Jakarta Barat. Hal tersebut terlihat melalui tuturannya *“Kami tak ada urusan dengan pilgub. Urusan kami soal penistaan agama yang dilakukan Ahok,” ucapnya*. Konteks tuturan tersebut terjadi, karena Pn sangat kecewa terhadap soal penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Peristiwa yang melatarbelakangi tuturan tersebut, dikarenakan Pn merasa Mt menghina umat islam soal penistaan agama. Pn menganggap Mt tidak pantas mencalonkan gubernur lagi, karena dengan tuturan yang menghina salah satu surat di Al Qur'an. Sebagai tokoh seharusnya Mt bersikap baik dan bijaksana tidak membawa agama kedalam kampanye. Oleh sebab itu, Pn menggunakan daya mencemooh untuk menghasilkan tuturan yang dituturkan kepada Mt, sehingga memberikan efek kepada Mt agar bertanggungjawab atas tuturannya sebelum mencalonkan gubernur DKI Jakarta.

3.2.2 Daya Mengkritik

Daya mengkritik adalah kekuatan pesan yang ditimbulkan untuk menghasilkan suatu tuturan yang diujarkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan ingin membuat kritikan terhadap kinerja atau kegiatan mitra tutur.

Data (25)

Masih Lemah

Ditemui secara terpisah, tim pasangan calon Basuki dan Djarot Saiful Hidayat menilai penanganan kasus penghadangan kampanye oleh pengawas pemilu dan penegak hukum masih lemah. Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi.

(D.25/Kompas: “Polisi Tegaskan Penghadangan Pidana,” 17 November 2016)

Eksplikatur : *Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi.*

Pemarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : - Pn adalah paslon gubernur DKI Jakarta Basuki-Djarot.

- Pn melaporkan penghadangan kampanye oleh Bawaslu Dan panwaslu.

Implikatur : - Pn merasa geram tindakan Mt yang selalu tidak tuntas masalahnya.

- Pn merasa kasus lama tidak segera tuntas dan kasus baru datang.

- Mt akan melakukan tindakan penghadangan kampanye.

Berdasarkan data di atas terlihat Pn dalam menggunakan daya mengkritik dalam menyampaikan tuturannya kepada Mt yakni kepada Bawaslu dan Panwaslu. Hal tersebut terlihat melalui tuturan *penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi*. Konteks tuturan tersebut memperlihatkan bahwa Pn tidak puas dengan kinerja Bawaslu dan Panwaslu sebagai ketua pemilu yang tidak mampu menangani masalah penghadangan kampanye oleh Basuki-Djarot tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi. Peristiwa yang melatarbelakangi tuturan tersebut, dikarenakan Pn merasa tidak puas dengan apa yang dikerjakan Mt dalam menangani masalah penghadangan oleh salah satu warga yang dianggap provokasi

atau mempengaruhi warga yang lain. Oleh karena itu, Pn menggunakan daya mengkritik untuk menghasilkan tuturannya yang dituturkan kepada Mt, dengan maksud memberikan efek kepada Mt agar segera tuntas masalahnya untuk menangani masalah penghadangan kampanye yang terjadi pada paslon nomer urut 2 yaitu Basuki-Djarot.

3.2.3 Daya Menyindir

Daya menyindir adalah kekuatan pesan yang ditimbulkan untuk menghasilkan suatu tuturan yang diujarkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan ingin membuat sindiran terhadap kinerja atau kegiatan mitra tutur agar memberikan pengaruh psikologis mitra tutur.

Data (24)

Seharusnya Bawaslu hadir dalam kampanye Basuki-Djarot. Apabila menemukan warga yang berdemo seperti itu, Bawaslu menjelaskan kepada warga, sesuai aturan kampanye, mereka bisa dipidana karena menolak kampanye,” tutur Wibi. (D.24/Kompas: “Hak Berkampanye Dilanggar,” 14 November 2016).

Eksplikatur : *Seharusnya Bawaslu hadir dalam kampanye Basuki-Djarot.*

Pemarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : -Pn adalah paslon gubernur DKI Jakarta Basuki-Djarot.

-Pn melaporkan penghadangan kampanye oleh warga ke Mt.

Implikatur : -Pn ingin Mt melihat secara langsung penghadangan kampanye tersebut.

-Pn ingin Mt melakukan suatu tindakan agar tidak terjadi lagi penghadangan kampanye.

Berdasarkan data di atas terlihat Pn menggunakan daya mengkritik dalam menyampaikan tuturannya kepada Mt yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penghadangan Pn. Hal tersebut terlihat melalui tuturan *Seharusnya Bawaslu hadir dalam kampanye Basuki-Djarot*. Konteks tuturan tersebut terjadi karena kemarahan Pn terhadap kinerja Bawaslu yang tidak tegas terhadap penghadangan saat itu terjadi. Pn ingin Bawaslu melihat sendiri tragedi penghadangan kampanye. Peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya tuturan tersebut, Pn merasa kondisinya tidak dihargai oleh warga dan warga sudah dipengarui seseorang yang dianggap provokasi dengan menggunakan isu-isu politik curang. Untuk itulah Pn menggunakan daya Menyindir kepada Mt dalam tuturannya yang menganggap kinerja Bawaslu kurang cepat menangani masalah..

3.2.4 Daya Mengancam

Daya mengancam adalah kekuatan pesan yang ditimbulkan untuk menghasilkan suatu tuturan yang diujarkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan ingin mengancam dan memberikan efek mitra tutur agar memberikan pengaruh psikologis mitra tutur.

Data (10)

Jika terbukti, pihak penghalangan bisa dikenai pasal 187 Ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Terlapor bisa dikenai hukuman maksimal enam bulan penjara dan atau denda maksimal Rp 6 juta.

(D.10/Kompas: “110 Laporan pelanggaran dalam 14 hari”, 11 November 2016)

Eksplikatur : *Terlapor bisa dikenai hukuman maksimal enam bulan penjara dan atau denda maksimal Rp 6 juta.*

Pemarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : - Pn sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pn menerima laporan penghadangan kampanye pada Paslon Basuki-Djarot.

- Implikatur : - Pn menuntut jika terbukti laporan penghadangan berkampanye Mt akan dikenakan sanksi berupa enam bulan penjara dan denda 6 juta.
- Mt menuntut penghadangan diberikan sanksi yang tegas oleh Pn.

Berdasarkan data di atas terlihat Pn menggunakan daya mengancam dalam menyampaikan tuturannya kepada Mt yakni warga yang menghadang paslon saat berkampanye. Hal tersebut terlihat melalui tuturannya *Terlapor bisa dikenai hukuman maksimal enam bulan penjara dan atau denda maksimal Rp 6 juta*. Konteks tuturan tersebut terjadi di karenakan kemarahan Pn kepada Mt yang menghalangi prosesnya kampanye akan diberikan sanksi berupa 6 bulan penjara atau denda 6 juta.

Peristiwa yang melatarbelakangi tuturan tersebut, disebabkan Pn merasa bahwa Mt menghalangi paslon nomer urut 2 yang sedang berkampanye. Pn juga menganggap Mt sebagai provokasi dan memepengarui warga untuk menolak paslon nomer 2. Oleh sebab itu Pn menggunakan daya mengancam kepada Mt dalam menghasilkan tuturan yang diujarkan kepada Mt dengan maksud untuk memberikan efek jera perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan penghalangan oleh paslon.

3.2.5 Daya Menuntut

Daya menuntut adalah kekuatan pesan yang ditimbulkan untuk menghasilkan suatu tuturan yang diujarkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan ingin menuntut mitra tutur agar memberikan pengaruh psikologis mitra tutur supaya mitra tutur menuruti apa yang diinginkan penutur.

Data (21)

Sandiaga menyatakan, hasil survei menunjukan peningkatan perolehan suara untuk pihaknya sejak debat pertama lalu. Ia optimistis, dengan bekal suara saat ini, pasangan ini setidaknya bisa masuk putaran kedua apabila pilkada sampai gelar dua kali.

“Kalau tidak ada kecurangan, kami yakin bisa masuk putaran kedua,” kata Sandiaga.

(D.21/Kompas: “Warga Diharapkan Aktif Mencegah Kecurangan,” 23 Januari 2017).

Eksplikatur : *“Kalau tidak ada kecurangan, kami yakin bisa masuk putaran kedua,” kata Sandiaga.*

Pemarkah Lingual : Tanda Petik dua (“...”)

Penanda Nonlingual : - Pn adalah paslon gubernur DKI Jakarta nomer
urut 3.

- Pn saat mengetahui hasil survei perolehan suara
pada debat pertama.

Implikatur : - Pn menuntut Mt untuk melakukan tindakan dan
pengawasan lebih ketat.

- Pn menuntut untuk masuk putaran kedua.

Berdasarkan data di atas terlihat Pn menggunakan daya menuntut dalam menyampaikan tuturannya kepada Mt yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat melihat hasil survei debat. Hal tersebut terlihat melalui tuturannya *“Kalau tidak ada kecurangan, kami yakin bisa masuk putaran kedua”*. Konteks tuturan tersebut terjadi di karenakan kecewa Pn kepada Mt saat perolehan suara dilakukan debat pertama. Pn menganggap Mt tidak mengawasi lebih ketat dalam debat pertama. Peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya tuturan tersebut, disebabkan rasa kecewa Pn kepada Mt ada oknum yang curang dalam pilkada ini. Menurut Pn kepada Mt tidak mengawasi lebih ketat dalam debat pertama. Oleh sebab itu, Pn menggunakan daya menuntut untuk menghasilkan tuturan yang dituturkan kepada Mt agar melakukan tindakan atau tinjauan lagi atas pelaporan Pn, sehingga Pn masuk putaran kedua.

3.2.6 Daya Mendesak

Daya mendesak adalah kekuatan pesan yang ditimbulkan untuk menghasilkan suatu tuturan yang diujarkan penutur kepada mitra tutur dengan tujuan ingin mendesak mitra tutur agar memberikan pengaruh psikologis mitra tutur supaya mitra tutur menuruti apa yang diinginkan penutur.

Data (02)

Pasangan Agus-Sylvi dating ke acara penetapan pasangan calon itu dengan batik bermotif. Monumen Nasional (Monas) dan ondel-ondel. Agus ingin memopulerkan batik khas Betawi. Menurut Agus, banyak perajin DKI yang perlu difasilitasi untuk meningkatkan angka produksi. (D.02/Kompas: “Dana Mesti Dilaporkan “, 25 Oktober 2016).

Eksplikatur : *Menurut Agus, banyak perajin DKI yang perlu difasilitasi untuk meningkatkan angka produksi.*

Permarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : - Pn adalah calon pasangan gubernur DKI Jakarta.
- Saat menghadiri rapat pleno terbuka di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Implikatur : - Pn ingin mepopulerkan batik khas Betawi
- Salain itu Pn juga ingin pada Mt meningkatkan angka produksinya agar ada dana masuk.

TTD : - Menyuruh

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Pn menggunakan daya mendesak dalam menyampaikan tuturannya kepada Mt yakni Pengrajin Batik Betawi dan pemerintah yang terdapat dalam wacana Politik. Hal tersebut terlihat melalui tuturannya *menurut Agus,s banyak perajin DKI yang perlu difasilitasi untuk meningkatkan angka produksi.* Konteks tuturan tersebut terjadi dikarenakan kecewa Pn kepada Mt merasa belum difasilitasi yang memadai untuk pengrajin batik Betawi, agar meningkatkan angka produksi. Peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya tuturan tersebut, disebabkan kekecewaan Pn kepada Mt yang soal batik Betawi mulai pudar angka produksi disebabkan fasilitas yang kurang. Oleh sebab itu, Pn

menggunakan daya mendesak untuk menghasilkan efek kepada Mt dengan tujuan segera diasilitasi pengrajin batik Betawi agar meningkatkan angka produksinya.

3.3 Implikasinya Tindak Tutur Direktif Paslon Gubernur di Wacana Politik SKH Nasional Terhadap Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMP

Tindak Tutur Direktif Paslon Gubernur di Wacana Politik SKH Nasional. Dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP yang berkaitan dengan tindak tutur direktif mengungkapkan pendapat. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar berikut.

3.3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia SMP

Kelas : VIII

Semester : 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Mendengarkan 1. Memahami wacana lisan berbentuk laporan.	1.2 Menanggapi isi laporan

3.3.2 Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menanggapi isi laporan perjalanan teman.
2. Siswa dapat memberikan masukan terhadap laporan perjalanan teman.

Berdasarkan Kompetensi Dasar dan tujuan pembelajaran di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP terkait tindak tutur direktif paslon gubernur di wacana politik. Misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. Penelitian ini, maka materi yang berkaitan dengan tindak tutur direktif dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk berekspresi, dan mengungkapkan pendapat. Salah satu tindak tutur direktif pada paslon gubernur di wacana politik, untuk memberikan contoh kepada siswa tentang tindak tutur direktif. Dari paparan di atas, guru dapat melakukan langkah-langkah berikut.

1. Cara mengemukakan pertanyaan dan tanggapan.

- a. Pertanyaan dan tanggapan yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan.
 - b. Pertanyaan dan tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah.
 - c. Pertanyaan dan tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain.
 - d. Pertanyaan dan tanggapan disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat.
 - e. Pertanyaan dan tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan.
 - f. Pertanyaan dan tanggapan dapat didukung atau diperjelas dengan gerak, mimik, nada suara, tekanan, dan intonasi.
2. Menolak atau menyanggah pendapat orang lain harus mengingat hal berikut.
- a. Emosi marah dan prasangka negatif harus dihindari.
 - b. Sanggahan harus objektif, logis, dan jujur.
 - c. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan yang dapat meyakinkan peserta lain.
 - d. Sanggahan atau penolakan disampaikan secara urut, terperinci, teliti, dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian, sanggahan mudah dimengerti.
 - e. Jangan menjelekkan orang lain.

3.3.3 Materi Ajar

Masih Lemah

Ditemui secara terpisah, tim pasangan calon Basuki dan Djarot Saiful Hidayat menilai penanganan kasus penghadangan kampanye oleh pengawas pemilu dan penegak hukum masih lemah. Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi.

(D.25/Kompas: “Polisi Tegaskan Penghadangan Pidana,” 17 November 2016).

Eksplikatur : *Penanganan kasus lama tak segera tuntas, sementara kasus baru terjadi.*

Pemarkah Lingual : -

Penanda Nonlingual : - Pn adalah paslon gubernur DKI Jakarta Basuki-Djarot

- Pn melaporkan penghadangan kampanye oleh Bawaslu Dan panwaslu

Implikatur : - Pn merasa geram tindakan Mt yang selalu tidak tuntas masalahnya.

- Pn merasa kasus lama tidak segera tuntas dan kasus baru datang.

- Mt akan melakukan tindakan penghadangan kampanye.

TDD : Mengkritik

Berdasarkan contoh materi mengenai tindak tutur direktif mengkritik dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapat di atas, guru dapat menjelaskan kepada siswa bagaimana contoh berekspresi dan mengungkapkan pendapat dengan tidak santun. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. Apa tanggapan siswa mengenai materi tersebut santun atau tidak. Selain itu, apakah paham siswa atas tanggapan siswa yang disamapaikan oleh penutur.

Berdasarkan penjelasan mengenai implementasi sebagai materi ajar bahasa Indonesia di SMP, Kesantunan dan daya pragmatik tindak tutur direktif paslon pemilihan gubernur di wacana politik. Berguna untuk dijadikan sebagai bahan maupun acuan untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII semester 1, menanggapi isi laporan. Materi pembelajaran diambil dari Kesantunan dan daya pragmatik tindak tutur direktif paslon pemilihan gubernur di wacana politik, sebagai contoh untuk mengetahui bagaimana cara menanggapi atau menyikapi dalam

tuturannya dengan menggunakan tindak tutur direktif apakah bermaksud menyuruh, menentang, memohon, meminta, mengkritik.

3.4 Pembahasan

a. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan dari penelitian berikut ini:

1. Tuturan paslon gubernur DKI Jakarta memiliki bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif yang berbeda mulai dari tipe memerintah, tipe meminta, tipe mengajak, tipe memberi nasihat, tipe mengkritik, dan tipe melarang. Setiap tuturan para paslon gubernur terdapat bentuk kesantunan yang berbeda mulai dari tuturan yang bersifat negatif sampai positif.
2. Tuturan paslon gubernur dalam berekspresi mengandung beberapa maksud daya pragmatik. Peneliti menemukan beberapa maksud daya pragmatik dari tuturan paslon gubernur DKI Jakarta. Mulai daya mencemooh, daya mengkritik, daya menyindir, daya mengancam, daya menuntut, daya mendesak, sampai daya menyuruh.
3. Hasil penelitian tindak tutur direktif dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII SMP yang berkaitan dengan tindak tutur direktif mengungkapkan pendapat. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompetensi Dasar 1.2 menanggapi isi laporan. Indikatornya siswa dapat menanggapi dan memberikan masukan tentang laporan tersebut.

b. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian tentang kesantunan dan daya pragmatik tindak tutur direktif paslon pemilihan gubernur di wacana politik SKH nasional. Data yang diperoleh peneliti ada 30 data. Dalam penelitian ini *Pertama*, bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif pada paslon gubernur DKI Jakarta, terdapat 30 data. Peneliti menemukan bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif ada enam kategori dalam tuturan paslon pemilihan gubernur yaitu: (1) kategori tipe memerintah, kategori tipe meminta, kategori tipe mengajak, kategori memberikan nasihat, kategori tipe mengkritik, dan kategori tipe melarang. Berikut ini tabel yang menggambarkan kategori tindak tutur direktif dalam paslon pemilihan gubernur di wacana politik.

Tabel 1. Kategori tindak tutur direktif dalam paslon pemilihan gubernur di wacana politik

No.	Kategori Tindak Tutur Direktif	Jenis Tindak Tutur Direktif
1	Tipe Memerintah	Menyuruh, Menginstruksikan
2	Tipe Meminta	Menawarkan, Mengharapkan, Memohon, Meminta
3	Tipe Mengajak	Menargetkan, Menuntut, Mendukung, Mendorong, Menantang, dan Mengajak
4	Tipe Memberikan Nasihat	Mengarahkan, Mengusulkan, Menyarankan, Menganjurkan, Menyerukan, Memberikan Saran, Mengingatkan, dan Menghimbau
5	Tipe Mengkritik	Mengkritik
6	Tipe Melarang	Mencegah dan Melarang

Berdasarkan tabel di atas, bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif yang ditemukan oleh peneliti yaitu menargetkan 1 data, menyuruh 2 data, mengarahkan 1 data, menawarkan 1 data, mengusulkan 2 data, mengharapkan 2 data, memohon 2 data, menyarankan 1 data, menganjurkan 1 data, menuntut 2 data, menyerukan 1 data, meminta 2 data, mendukung 1 data, memberikan saran 1 data, mendorong 2 data, menantang 1 data, menginstruksikan 1 data, mengingatkan 1 data, mencegah 1 data, melarang 1 data, mengajak 1 data, mengkritik 1 data, dan menghimbau 1 data.

Peneliti juga menggunakan kesantunan Brown dan Levinson (Chaer, 2010:49-55) dalam menganalisis tuturan paslon gubernur DKI Jakarta. Peneliti menemukan kesantunan negatif dan kesantunan positif. Kesantunan negatif yaitu pada tuturan yang minimalkan paksaan, mintalah maaf, kesantunan yang bersifat umum, dan pakailah bentuk impersonal yaitu dengan tidak menyebutkan penutur dan lawan tutur. Sedangkan kesantunan positif yaitu kesantunan yang memperhatikan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan lawan tutur, menyatakan paham atau mengerti akan keinginan lawan tutur, memberikan tawaran atau janji kepada lawan tutur, melibatkan

Penutur dan lawan tutur dalam aktivitas, memberikan hadiah dan kerja sama kepada lawan tutur, menunjukkan keoptimisan, mengintensifkan perhatian penutur dengan mendramatisasikan peristiwa dan fakta, serta menghindari ketidaksetujuan dengan pura-pura setuju.

Tabel 2. Daya Pragmatik Paslon Gubernur di Wacana Politik

No.	Daya Pragmatik	Jumlah Data
1.	Daya Mencemooh	1
2.	Daya Mengkritik	1
3.	Daya Menyindir	1
4.	Daya Mengancam	1
5.	Daya Menuntut	1
6.	Daya Mendesak	1

Kedua, daya pragmatik yang terdapat dalam tuturan *Paslon Pemilihan Gubernur di Wacana Politik* mengandung enam maksud/daya. 1) Daya mencemooh ada 1 data, 2) Daya mengkritik ada 1, 3) Daya menyindir ada 1 data, 4) Daya mengancam ada 1 data, 5) Daya menuntut ada 2 data, dan 6) Daya mendesak ada 1 data.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *paslon pemilihan gubernur* di atas terlihat bahwa bentuk-bentuk kesantunan direktif terdapat 30 data dalam wacana politik dan metropolitan, serta maksud daya pragmatik dalam wacana politik dan metropolitan terdapat 6 data. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian peneliti mengimplikasinya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP kelas VIII pada *Standar Kompetensi (SK) 1. Memahami wacana lisan berbentuk laporan, dan Kompetensi Dasar (KD) 1.2. Menanggapi isi laporan*. Peneliti mengimplikasikan bahan ajar tersebut diambil dari salah satu tuturan paslon gubernur pada data ke 25 diterapkan di SMP Negeri 3 Sawit.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan jika dibandingkan dengan temuan sebelumnya, secara umum penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, khususnya pada tindak tutur direktif. penelitian ini memiliki tiga perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama terletak pada obyek kajian, obyek yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tuturan paslon pemilihan gubernur yang terdapat dalam media cetak Kompas. Kedua, dari penelitian sebelumnya analisis hanya difokuskan pada tindak tutur direktif, tidak mengkaji lebih tentang daya atau makna yang terkandung di dalam suatu tuturan. Ketiga, hasil penelitian sebelumnya tidak diimplikasikan dalam bentuk bahan ajar bahasa Indonesia.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut ada tiga hal yang perlu disampaikan dalam kesimpulan ini. Pertama, bentuk-bentuk tindak kesantunan direktif dalam tuturan paslon peneliti menemukan bentuk tindak kesantunan direktif ada enam kategori yaitu, (1) tipe memerintah (2) Tipe meminta (3) Tipe mengajak, (4) tipe memberi nasihat (5) tipe mengkritik, (6) tipe melarang. Dalam tuturan paslon gubernur DKI Jakarta didominasi dengan janji-janji dan visi misi jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Penutur lebih banyak menggunakan strategi kesantunan positif dalam berkampanye.

Daya pragmatik dalam tuturan yang dimaksudkan oleh paslon gubernur DKI Jakarta ada enam daya yaitu daya mencemooh, daya mengkritik, daya menyindir, daya mengancam, daya menuntut, dan daya mendesak. Temuan penelitian ini diimplikasikan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia kelas VIII semester 1, pada Stan KD 1.2 menanggapi isi laporan. Siswa diajarkan cara menanggapi sebuah laporan apakah menggunakan tuturan direktif.

Daftar Pustaka

- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdinas. 2008. *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahsun. 2012. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Trosbrog, Anna. 1995. "Statutes and contracts: An analysis of legal speech acts in the English language of the law." Denmark: *Jurnal Pragmatik* Vol 23, Issue 1, Januari 1995, hal 31-53.

- Widodo, Chomsin S. dan Jasmadi. 2008. *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gramedia.
- Yule, George (1996). *Pragmatik*. Terjemahan Indah Fajar Wahyuni dan Rombe Mustajab. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, Rina. Rohmadi, Muhammad., dan Suhita, Raheni. 2013. “Daya Pragmatik Tindak Tutur Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama.” Surakarta: *Jurnal Penelitian Bahasa Indonesia dan Pengajarannya*. Vol.2. No.1 April 2013, hal. 1-4.